

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH,  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
ALOKASI UMUM TERHADAP  
PENGALOKASIAN ANGGARAN  
BELANJA MODAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi**

**Disusun Oleh:**

**NANCY WIJAYANTI KUSUMADEWI**

**B 200050248**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2010**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi menjadi UU 32/2004) tentang pemerintahan daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi pemerintahan daerah (Eksekutif) dengan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah (Legislatif). Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan. Pada pemerintahan, peraturan peundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif dan publik.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang mendasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran.

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran

pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (incomplete contract) yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory yang mana pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dalam penganggaran sektor publik. Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal dalam masalah utama dalam pengalokasian sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam public expenditure management. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja

menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk asset tetap, yakni peralatan bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena asset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah asset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Berdasarkan latar belakang dan dari berbagai faktor yang telah diuraikan maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: “PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH

DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal ?
2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal ?
3. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?

## **C. Pembatasan Masalah**

Banyaknya faktor yang mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja daerah, dan agar permasalahan tidak meluas maka dalam penelitian ini pembahasannya di batasi oleh :

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel belanja modal, pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada:

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap anggaran belanja modal.
2. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran belanja modal.
3. Pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap anggaran belanja modal.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman meneliti bagi penulis.
2. Untuk dijadikan informasi bagi pemerintah daerah se-Jawa Tengah dalam pengalokasian anggaran belanja modal.
3. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya baik dari kalangan mahasiswa maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan penelitian dapat mencapai tujuan dan dapat terarah maka skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yaitu otonomi daerah, akuntansi keuangan pemerintah daerah, anggaran belanja, jenis-jenis anggaran, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian, jenis data dan sumber data Definisi operasional dan pengukuran variabel, serta alat analisis untuk menilai anggaran belanja modal daerah.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum, analisis data, pembahasan hasil penelitian.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian.